



Mkt+



EKONOMI HIJAU UNTUK MASA DEPAN PERADABAN

Perubahan iklim menjadi tantangan terbesar umat manusia. Melalui kebijakan ekonomi hijau dan *green budgeting*, pemerintah berharap mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu dijalankan bersama dengan komitmen kuat untuk menyelamatkan masa depan peradaban.

Daftar Isi

APBNKITA

04 Realisasi APBN 2021

DARI LAPANGAN BANTENG

05 Tumbuh Berdampingan

PHOTO STORY

06 Painan, Pesona Tersembunyi Sumatera Barat

LAPORAN UTAMA

08 Ciptakan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan

10 Transformasi Ekonomi Hijau

12 Infografik

GENERASI EMAS

14 Penuh Asa Dedikasi Sang Guru

POTRET KANTOR

16 Bintang di Jagoi Babang

TEKA-TEKI

18 Teka Teki Februari Edisi Minggu Pertama

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pelindung: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:**

Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. **Penanggung**

Jawab: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto.

Pemimpin Umum: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan

Informasi Rahayu Puspasari. **Pemimpin Redaksi:** Kabag

Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:**

Kasubbag Publikasi Cetak Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:**

Ferry Gunawan, Dianita Sulastuti, Titi Susanti, Budi Sulisty,

Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Alit

Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Budi Prayitno,

Budi Sulisty. **Tim Redaksi:** Reni Saptati D.I, Danik Setyowati,

Abdul Aziz, Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah

Karunia Putra, A. Wirananda, CS. Purwowidhu Widayanti,

Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati

Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila

Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budiando Putri,

Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo,

Ika Luthfi Alzuhri, Irfan Bayu **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda,

Resha Aditya Pratama, Andi Al Hakim, Arief Kuswanadji, Intan

Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono,

Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan**

Layout: Venggi Obdi Ovisa, Ditto Novenska **Alamat Redaksi:**

Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta

Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:**

mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

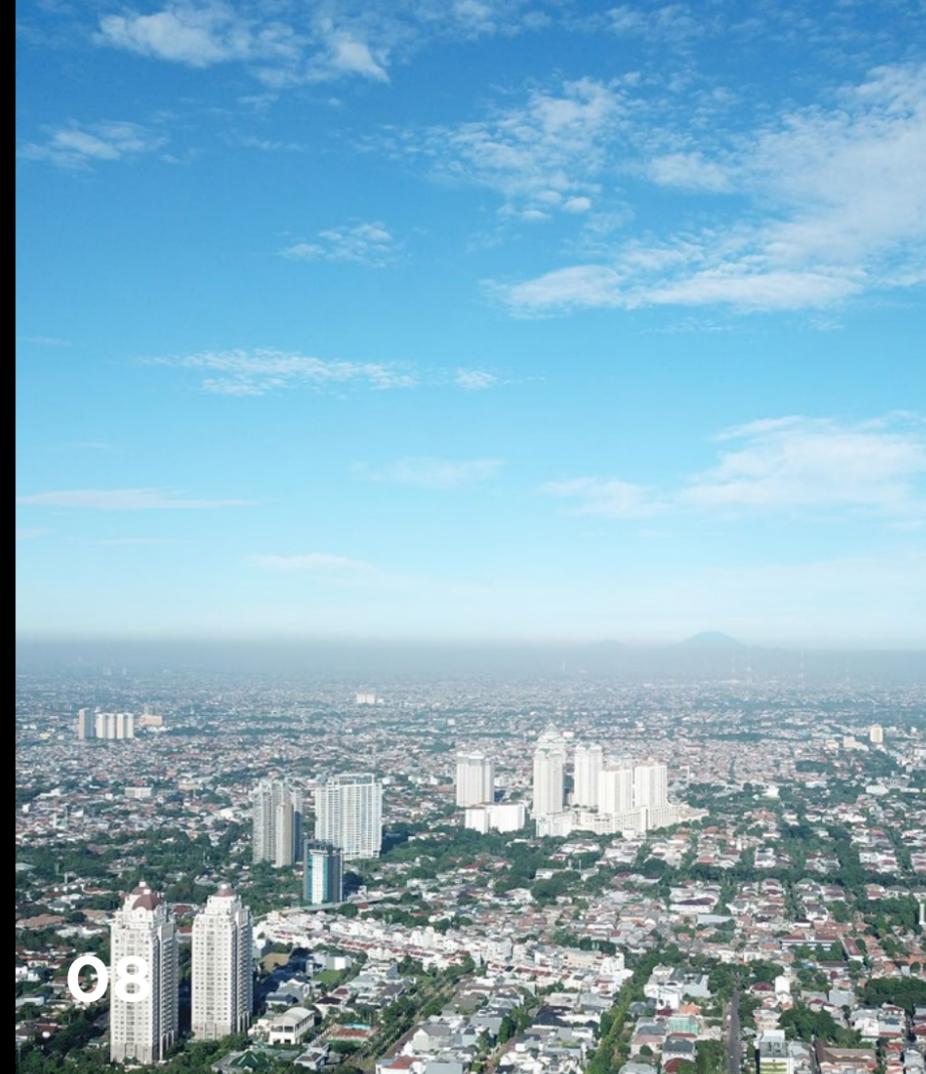


Foto Cover Resha Aditya

COVER STORY:

Program perlindungan sosial (Perlinsos) masih menjadi salah satu upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi di tahun 2021. Pada cover majalah edisi ini, kami mengibaratkan program perlindungan tersebut dengan sebuah payung. Orang memegang payung untuk melindungi dari cuaca yang panas dan juga hujan. Begitu juga dengan Perlinsos yang melindungi masyarakat dari efek ekonomi dari pandemi Covid-19.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.



Realisasi APBN 2021
(Per 31 Januari 2021)

Pendapatan Negara

Rp100,07 triliun

Belanja Negara

Rp145,77 triliun

(Rp21,05) triliun

Keseimbangan Primer

(Rp45,7) triliun

Surplu/(Defisit) Anggaran

Pembiayaan Anggaran

Rp165,9 triliun

Tumbuh Berdampingan

Beberapa minggu lalu, ibu kota dan sejumlah kota lain sempat mengalami hujan dengan intensitas tinggi. Banjir besar hingga sehari-hari pun tak terhindarkan. Intensitas hujan dari tahun ke tahun rasa-rasanya seringkali masuk dalam kategori ekstrem. Iklim dan lingkungan yang sehat memang pada akhirnya menjadi faktor penentu apakah keberhasilan dunia melakukan pembangunan akan terus berlanjut atau tidak.

Perubahan iklim adalah tantangan terbesar umat manusia. Untuk menanggulangnya pun tak bisa sendiri-sendiri, diperlukan kerja sama yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Aksi perubahan iklim global sebetulnya sudah dimulai sejak 3 dekade lalu melalui adopsi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang merupakan kerangka kerja sama global untuk perubahan iklim. Terpilihnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sebagai Co-Chair Coalition of Finance Ministers for Climate Action periode 2021-2023 juga semakin memperkuat posisi negara berkembang dalam menyuarakan aspirasinya terkait perubahan iklim di kancah global.

Aksi perubahan iklim tanpa

pendanaan musykil akan berhasil. Oleh sebab itu, peran Menteri Keuangan menjadi sangat penting karena aksi perubahan iklim membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan K/L lainnya juga telah mengimplementasikan aksi pengendalian perubahan iklim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan memasukkan aspek perubahan iklim ke dalam prioritas nasional keenam. Kita semua menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya akan bisa dicapai dengan kelestarian lingkungan dan efisiensi sumber daya. Tak heran, Bill Gates bahkan pernah berujar "COVID-19 is awful. Climate change could be worse". Pembaca dapat memahami lebih lanjut komitmen-komitmen pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau di edisi ini!

Rahayu Puspasari

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu



Painan, Pesona Tersembunyi Sumatera Barat

Teks Resha Aditya Foto Adhi Kurniawan

Kota Painan merupakan kota kecil di Sumatera Barat yang berjarak tiga jam dari Kota Padang. Kota ini memiliki beberapa destinasi wisata alam salah satunya adalah Pantai Carocok. Dengan kombinasi menawan dari pasir putih yang lembut, air laut biru kehijauan yang jernih, ombak yang tidak terlalu besar, serta deretan pohon kelapa, pantai ini sangat cocok bagi pengunjung yang hendak bersantai. Dan dari pantai, terdapat juga jembatan kayu menuju pulau-pulau kecil yang asri.



Ciptakan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan

Teks Dara Haspramudilla Foto Cahyo Aif

Isu perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan tapi persoalan pembangunan yang berdampak pada sektor keuangan, ekonomi, pembiayaan dan sebagainya.

“Pulau Jawa berstatus siaga banjir,” begitu bunyi peringatan BMKG di

pertengahan Februari 2021. Peringatan ini pun terbukti, beberapa provinsi di Pulau Jawa mengalami banjir. Bencana serupa juga terjadi di Kalimantan selatan pada pertengahan Januari 2021. Kilas balik ke 2019, sebanyak 1,6 juta hektar hutan/lahan Indonesia juga mengalami kebakaran.

Intensitas bencana hidrometeorologi meningkat dalam satu dekade terakhir. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim adalah penyebabnya. Sebagai negara kepulauan sekaligus kontributor emisi global, Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan.

Menurut Andhyta F. Utami, Environmental Economist dan Co-Founder Think Policy Society, kerentanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yakni potensi kenaikan permukaan air laut, banjir, dan kekeringan. Kenaikan permukaan laut berdampak pada 42 juta penduduk Indonesia yang tinggal di kota pinggir laut dan pesisir.

“Banjir permanen juga berdampak pada 4 juta orang di tahun 2070-2100 dan 1.500 pulau berpotensi tenggelam di tahun 2050. Dari sisi kekeringan, frekuensi El Nino menjadi *double* dan ini akan berdampak pada pertanian dan keberadaan air,” tambah Andhyta.

Proyeksi Bappenas memperlihatkan Indonesia di masa depan hingga 2045 akan mengalami cuaca ekstrem baik basah maupun kering. Kondisi ini juga akan berimplikasi ke sektor ekonomi.

Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Medrilzam menuturkan bahwa isu perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan tetapi persoalan pembangunan

yang berdampak pada sektor keuangan, ekonomi, pembiayaan dan sebagainya.

“Untuk itulah kami menggagas pembangunan rendah karbon (PRK) sebagai program pembangunan RPJMN 2020-2024 untuk memulai perubahan signifikan. Kita berharap ada keseimbangan antara isu lingkungan dan ekonomi serta meminimalkan *trade-off* antara keduanya,” terang Medrilzam.

Akselerasi transisi, optimalkan potensi

Dalam mempercepat transisi menuju PRK beberapa kebijakan dan upaya dilakukan pemerintah baik dari sisi substansi, kelembagaan, dan pembiayaan. Dari sisi substansi, ada lima bidang yang akan difokuskan agar PRK dapat berjalan baik.

“Pertama adalah sektor energi di mana ke depannya kita akan melakukan transisi dari *brown energy* ke *green energy*. Prioritas kedua tentunya adalah lahan yang menjadi kontributor emisi terbesar dan juga terkait dengan kehidupan masyarakat. Ketiga, pengolahan limbah baik limbah domestik maupun industri termasuk B3. Kemudian sektor industri, di mana program *green industry* akan kita dorong. Terakhir terkait *blue carbon* melalui pengelolaan mangrove yang lebih baik,” jelas Medrilzam.

Dari sisi regulasi, pemerintah telah mengusulkan RUU Energi Baru Terbarukan dan Perpres *Feed in Tariff* yang saat ini sedang dibahas bersama DPR. Sementara dari sisi kebijakan, pemerintah telah memulai beberapa program inisiatif mulai dari *food estate*, restorasi masif, dan upaya *replanting*. Tidak hanya itu, inovasi dalam mekanisme pembiayaan juga digodok untuk mempermudah pembangunan

karbon berjalan baik.

Menurut Andhyta, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk mengeksport karbon atau memanfaatkan sektor lahan dan hutan menjadi *carbon offset*.

“Elon Musk sempat menulis cuitan di Twitter jika ada yang bisa menemukan teknologi untuk menyerap karbon dia akan investasi 1 milyar. Sebenarnya teknologi untuk menyerap karbon itu sudah ada, yaitu hutan. Indonesia punya keunikan dan keistimewaan sebagai negara yang hutannya luas, hutan alam, hutan primer yang masih belum tersentuh dan yang masih *pristine*. Ini yang harus dijaga,” ungkapnya.

Pola pikir dan komitmen belum senada

Medrilzam menyatakan bahwa banyak hambatan dan tantangan dalam melakukan perubahan. Salah satu yang terberat adalah soal pola pikir.

“Perubahan *mindset* ini yang berat sebab masih ada perbedaan di antara pengambil keputusan. Selain itu, kita juga masih melihat sebuah persoalan secara parsial. Tidak terintegrasi. Jadi, *multiplier effect* itu seringkali tidak dilihat secara menyeluruh,” pungkasnya.

Sementara itu, Andhyta berpendapat bahwa tantangan utama di Indonesia ada di sisi implementasi.

“Dari sisi perencanaan, Indonesia dapat dikatakan *advanced*. Kita ada *modelling* PRK tadi lalu ada target penurunan emisi sampai 2030. Namun, tinggal pelaksanaannya harus didorong juga komitmen yang sama antara kementerian yang membuat perencanaan dengan kementerian-kementerian sektoral,” tandasnya.

Transformasi Ekonomi Hijau

Teks Reni Saptati D.I Foto Faiz

Indonesia, sebuah negara kepulauan beriklim tropis terbesar di dunia, sebuah negeri yang sangat rentan terkena dampak perubahan iklim.

Banjir, kekeringan, penurunan kualitas air bersih, dan peningkatan prevalensi penyakit akan kian menghampiri jika isu perubahan iklim tak segera ditangani. Namun, isu ini bukanlah ancaman bagi Indonesia saja. Perubahan iklim adalah ancaman bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi, tanpa kecuali. Sayangnya, menanggulangi perubahan iklim lebih sulit dibanding mengatasi pandemi.

Sejak tiga dekade lalu, aksi global telah dimulai melalui pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Namun, pertemuan tahunan UNFCCC tersebut awalnya dihadiri oleh para menteri di bidang lingkungan hidup saja dan belum melibatkan menteri di bidang lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan, saat Indonesia menjadi tuan rumah UNFCCC di Bali pada 2008, dunia baru mulai tersadar bahwa banyak sekali kebijakan pengendalian perubahan iklim berhubungan dengan aspek keuangan.

“Saat itu, mulai dimasukkan pembahasan mengenai perubahan iklim di antara para Menteri Keuangan. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, Indonesia diminta untuk

menjadi tuan rumah pertama bagi para Menteri Keuangan dan Menteri Pembangunan untuk bisa berkumpul. Semenjak saat itu ada tradisi agar para Menteri Keuangan terlibat,” ungkap Sri Mulyani Indrawati.

Aksi perubahan iklim membutuhkan pendanaan yang sangat besar, untuk itu peran para Menteri Keuangan menjadi sangat krusial. Kerja sama internasional dan komitmen kuat dari berbagai negara diperlukan agar upaya pengendalian perubahan iklim berjalan baik. Terakhir, *Paris Agreement* pada 2016 menggariskan kewajiban semua negara untuk berkontribusi dalam mengurangi emisi.

Pada 10 Februari 2021, Menteri

Keuangan Sri Mulyani Indrawati terpilih sebagai *Co-Chair* dari *the Coalition of Finance Ministers for Climate Action* (Koalisi) periode 2021–2023 menggantikan Menteri Keuangan Chile. Koalisi ini bertujuan untuk mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam kebijakan-kebijakan dalam lingkup Menteri Keuangan serta mendukung upaya kolektif para Menteri Keuangan negara-negara anggota dalam menerapkan kebijakan fiskal, manajemen keuangan publik dan mobilisasi pendanaan perubahan iklim.

Terpilihnya Sri Mulyani

Indrawati mengafirmasi kepercayaan komunitas aksi perubahan iklim global yang besar pada Indonesia. Dengan menjadi *Co-Chair*, Indonesia menunjukkan *leadership*-nya dengan meningkatkan kontribusi untuk memajukan dan meningkatkan peran strategis Koalisi serta bersinergi dengan G-20, ASEAN, serta forum internasional lainnya.

Tak berhasil tanpa dukungan pendanaan

Indonesia telah memasukkan aspek perubahan iklim ke dalam prioritas nasional keenam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dengan tiga program prioritas. Pertama, peningkatan kualitas lingkungan dengan target Indeks kualitas lingkungan

hidup (IKLH) mencapai 73,25–75,25 pada 2024. Kedua, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan target pengurangan rasio kerugian ekonomi akibat dampak bencana dan bahaya iklim terhadap PDB sebesar 0,21 persen pada 2024. Ketiga, pembangunan rendah karbon yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,3 persen pada 2024.

Untuk memenuhi komitmen dan target tersebut, peran APBN sangat vital sebagai instrumen fiskal dalam mendorong proses transformasi ekonomi hijau. Berdasarkan *Second Biennial Update Report (2nd BUR)* tahun 2018, Indonesia diperkirakan membutuhkan pendanaan untuk



Kesungguhan dan keyakinan bersama untuk mampu melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah kunci utama keberhasilan upaya global ini.

Foto iStock

pengendalian perubahan iklim sebesar Rp3.461 triliun hingga tahun 2030.

“Berarti per tahunnya saja setidaknya kita memerlukan Rp266,2 triliun. Dari hasil penandaan anggaran perubahan iklim atau *Climate Budget Tagging* (CBT) sejak 2016 sampai dengan 2020, APBN hanya dapat memenuhi sekitar Rp86,7 triliun per tahunnya atau 34 persen dari kebutuhan tersebut,” jelas Sri Mulyani Indrawati.

Anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1 persen dari APBN. Selama lima tahun terakhir, 88,1 persen dari total anggaran perubahan iklim tersebut dibelanjakan dalam bentuk *green infrastructure* yang berfungsi sebagai roda penggerak perekonomian sekaligus modal utama transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Belanja diarahkan untuk pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan (EBT), transportasi berkelanjutan, sistem pengelolaan sampah dan limbah yang efisien, pengembangan bibit pertanian rendah emisi, hingga rehabilitasi hutan dan lahan.

Pemerintah bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ketahanan iklim

di Indonesia. Aksi ini tak akan berhasil tanpa dukungan pendanaan yang sangat besar. Namun, Indonesia masih memiliki *financial gap* yang besar untuk memenuhi target kebutuhan pendanaan. “Untuk membantu pendanaan perubahan iklim, pemerintah menerbitkan *Green Sukuk* pertama kali di pasar global tahun 2018 dengan total sebesar USD1,25 milyar dengan *underlying* berupa proyek-proyek hijau di kementerian / lembaga,” terang Sri Mulyani Indrawati.

Indonesia tercatat menjadi negara pertama yang menerbitkan *Sovereign Green Sukuk* dan *Sovereign Retail Green Sukuk* di dunia. Penerbitan *Green Sukuk* ini mendapatkan 10 penghargaan internasional antara lain dari IFR Asia, Islamic Finance News, Finance Asia, Euromoney, The Triple A, dan Climate Bond Initiative. Reputasi sangat baik diperoleh Indonesia atas penerbitan *Green Sukuk* ini.

Dukungan seluruh pihak

Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial

masyarakat, memastikan pembangunan yang inklusif, serta menjaga kualitas lingkungan hidup termasuk penanganan perubahan iklim. Konsep penandaan anggaran perubahan iklim telah yang dilakukan di APBN sejak 2016 hingga 2020 kemudian dikenalkan pula kepada pemerintah daerah.

Kementerian Keuangan melakukan inisiasi anggaran perubahan iklim di tingkat daerah atau dikenal dengan *Regional Climate Budget Tagging* atau RCBT. Langkah ini dimulai pada akhir 2019 dalam bentuk penyusunan buku pedoman penandaan RCBT. Kemudian, pada awal 2020 uji coba RCBT diterapkan di 11 daerah percontohan dan pada 2021 dijalankan di 6 daerah percontohan baru. Pengenalan konsep penandaan anggaran perubahan iklim ini diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk menyusun usulan rancangan kebijakan fiskal daerah yang tepat, serta mengidentifikasi sumber daya keuangan yang memadai dan efektif untuk mendanai aksi-aksi perubahan iklim.

Pengendalian perubahan iklim butuh dukungan dan komitmen kuat. Upaya ini tak dapat tuntas dalam waktu singkat. Kesungguhan dan keyakinan bersama untuk mampu melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah kunci utama keberhasilan upaya global ini. Sri Mulyani Indrawati mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersinergi dan bergandengan tangan dalam memerangi perubahan iklim. Mengendalikan dan menangani perubahan iklim adalah tanggung jawab semua penghuni bumi. Perubahan iklim adalah tentang masa depan bumi dan masa depan peradaban manusia

“Ini sudah menjadi kolaborasi global, di mana tidak hanya menteri lingkungan hidup, menteri keuangan, tetapi juga semua pihak dan semua negara,” pungkasnya.



Mewujudkan Ekonomi Hijau Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah cita-cita besar bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Namun, berbagai tantangan perlu dihadapi dan dimitigasi. Salah satu tantangan yang kian mencuat adalah soal perubahan iklim yang menjadi ancaman kehidupan manusia dan akan berimbas ke perekonomian. Pemerintah sudah menyadarinya dan jauh-jauh hari telah mempersiapkan Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Program).

Apa saja langkah Indonesia untuk mencegah perubahan iklim dan mewujudkan ekonomi hijau?

Dalam dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) kepada UNFCCC, Indonesia menargetkan:

- Penurunan emisi gas rumah kaca dengan upaya sendiri = 29 persen,
- Penurunan emisi gas rumah kaca dengan dukungan internasional dari skenario business as usual (BAU) pada tahun 2030 = sampai dengan 41 persen.

Aspek perubahan iklim menjadi prioritas nasional ke 6 (PN-6) yang dilakukan melalui:

- Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan target indeks pada tahun 2024 mencapai 73,25 - 75,25.
- Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim yang mengupayakan pengurangan rasio kerugian ekonomi akibat dampak bencana dan bahaya iklim terhadap PDB sebesar 0,21% di tahun 2024.
- Pembangunan rendah karbon menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,3% di tahun 2024.

Komitmen Kementerian Keuangan terhadap pengendalian perubahan iklim:

- kebijakan fiskal (APBN) digunakan sebagai katalisator pembangunan yang rendah karbon.
- mendorong kapasitas pembiayaan perubahan iklim nasional.
- menyediakan berbagai fasilitas perpajakan berupa tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk impor, pengurangan PPN, PPh ditanggung pemerintah, dan pengurangan pajak bumi bangunan untuk mendukung pengembangan panas bumi dan energi baru terbarukan lainnya.
- memiliki anggaran yang khusus mendanai kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berasal dari anggaran Kementerian/Lembaga.
- APBN mampu menggelontorkan anggaran belanja untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebesar Rp86,7 triliun per tahunnya (4,1% dari APBN atau hampir mendekati porsi anggaran kesehatan).



“Isu perubahan iklim sangat penting dan selalu menjadi perhatian Indonesia. Perhatian ini ditunjukkan melalui berbagai upaya dan kebijakan Pemerintah”

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan

Penuh Asa Dedikasi Sang Guru

Teks Resha Aditya Foto Dokumentasi Pribadi

Kata “menyerah” tidak ada dalam kamus Rahmat Putra Yudha, alumni penerima beasiswa LPDP yang juga menjabat sebagai Ketua Mata Garuda Kalimantan Barat. Kegigihan dan semangat pantang menyerahnya, menjadi kunci sukses untuk meraih penghargaan sebagai Guru Terhormat di Bidang Pendidikan pada akhir tahun lalu. Sebagai ASN di Kota Pontianak, berbagai kontribusi telah diberikan oleh Yudha, salah satunya adalah mendirikan program *Virtual Education Academy* (VEA). Seperti apa kisahnya? Simak perbincangan Media Keuangan berikut ini.

Sebelum berhasil menerima beasiswa LPDP, Anda sebelumnya telah melalui 118 seleksi beasiswa lainnya. Apa yang membuat Anda pantang menyerah untuk mengambil beasiswa?

Yang pertama, karena status saya sebagai ASN, pendidikan di luar negeri

hanya dapat saya lakukan melalui jalur beasiswa. Seorang ASN tidak mungkin bisa kuliah di luar negeri tanpa jalur beasiswa kecuali mendapat izin belajar dari atasan. Pun jika melalui izin belajar, tidak boleh meninggalkan tugas yang artinya saya harus berada di kota tempat saya mengajar. Jadi, jalur beasiswa adalah satu-satunya jalan untuk menempuh *study* di luar negeri. Yang kedua, saya merasa hidup ini hanya sebentar dan karenanya saya perlu meninggalkan *legacy* untuk keturunan saya. Saya perlu menjadi orang yang memiliki karakter yang dapat menjadi warisan dan panutan bagi anak dan cucu saya nanti. Oleh karena itu, berapapun kegagalan yang harus saya lalui, saya tidak pernah menyerah untuk mencapai cita-cita saya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

Apa yang membuat Anda tertarik mendaftar beasiswa LPDP?

Sebetulnya, saya mendaftar beasiswa tidak hanya LPDP. Saya mendaftar di hampir seluruh beasiswa *full scholarship*. Sayangnya, saya rata-rata gagal di penilaian pada saat *interview*. Dari kelemahan itulah, saya terus menggali kemampuan berkomunikasi saya, khususnya kemampuan dalam menyampaikan pendapat. Alhamdulillah, saat melakukan seleksi LPDP, sekali mencoba saya lulus. Poin lebih dari beasiswa LPDP adalah LPDP mencari calon penerima yang memiliki karakter *concern* dengan pembangunan Indonesia. Yang mereka cari adalah orang-orang yang memiliki niat tulus membangun negara melalui program atau kegiatan sosial yang diperuntukkan memberdayakan masyarakat. Sebenarnya, ini adalah kesempatan besar bagi anak bangsa yang memiliki niat membangun bangsa dan ingin meningkatkan kapasitasnya melalui pendidikan. Negara membutuhkan



Gedung Danadyaksa Cikini
Jl. Cikini Raya no. 91 A-D Menteng
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

orang-orang yang betul-betul bisa berbagi manfaat, menjadi penggerak, menjadi fasilitator untuk menggerakkan Indonesia. Bagi teman-teman yang memiliki *concern* di dunia sosial dan memiliki kepedulian lingkungan yang tinggi, menurut saya ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan beasiswa LPDP.

Mengapa Anda tertarik untuk mengambil program Master of Education TESOL Wollongong University Australia?

Ini agak unik. Suatu waktu, saya pernah mengikuti sebuah *expo* pendidikan luar negeri di Pontianak. Kebetulan pada saat itu, saya memang mengincar TESOL. Konselor di *expo* mengarahkan saya untuk berkonsultasi dengan perwakilan Wollongong University secara langsung. Saya diberikan buklet yang sampai saat ini masih saya simpan. Buklet tersebut saya bawa pulang, saya tandai Master of Education TESOL. Saya menargetkan TESOL karena memang jurusan itu selaras dengan pendidikan S1 saya yaitu bahasa Inggris. Buklet tersebut sampai usang karena sering saya lipat dan selalu saya bawa-bawa bahkan saat kerja sambil sebagai tukang parkir maupun kerja yang lain-lain. Pada saat itu, saya bilang ke teman-teman, saya akan kuliah di situ. Pada akhirnya, cita-cita tersebut benar-benar terwujud.

Bagaimana latar belakang berdirinya Virtual Education Academy (VEA)?

Akibat pandemi COVID-19, pemerintah menginstruksikan untuk melakukan proses pendidikan jarak jauh mulai tahun lalu. Pada waktu itu, kita menampung keluhan para guru tentang bagaimana agar literasi digital mereka meningkat. Akhirnya, kami berinisiatif mengadakan pelatihan bagi guru-guru melalui program VEA



Rahmat Putra Yudha, alumni penerima beasiswa LPDP

untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh; mulai dari pembuatan soal, penggunaan media virtual, sampai dengan penggunaan media atau animasi-animasi untuk membuat pembelajaran guru lebih menarik. Kami membuat programnya selama 3 minggu. Pelatihan ini bukan pelatihan biasa yang hanya mengajarkan teknologi, namun juga ada pendampingan dari LPMP Kalbar dan Universitas sebelas Maret (UNS). Alhamdulillah, sampai saat ini telah terjaring 3.500 guru dan dosen dari seluruh Indonesia yang mengikuti program tersebut.

Berbagai penghargaan telah Anda raih, salah satunya pada akhir tahun 2020 Anda dinobatkan sebagai Guru Terhormat di Bidang Pendidikan. Apa kunci sukses Anda?

Tidak ada kunci sukses yang spesifik. Hanya saja, saya dalam berbuat sesuatu tidak memikirkannya sebagai prestasi, yang saya fokuskan adalah dampaknya. Dengan adanya dampak

itu, saya merasa ada kepuasan batin tersendiri. Saya juga berpandangan bahwa yang bisa peduli dengan pendidikan kalau bukan guru siapa lagi? Tidak mungkin ada pihak lain yang benar-benar bisa peduli secara *pure* untuk mendorong dunia pendidikan berubah kecuali guru.

Apa pesan Anda untuk anak-anak muda Indonesia yang sedang meraih cita-citanya?

Pesan singkat saya adalah fokuskan cita-citamu, sinkronkan dengan apa yang sering Anda lihat dan apa yang sering Anda dengar. Melihat dan mendengar sesuatu yang kita inginkan akan mengerucut dengan apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman harus bijak dalam mengolah mata dan telinganya. Perlu diingat bahwa bermanfaat untuk orang lain bukan berarti kita hanya berkontribusi untuk orang lain, tetapi kita secara tidak langsung juga berkontribusi untuk diri kita sendiri. Energi baik akan kembali ke diri sendiri.

Bintang di Jagoi Babang

Teks Aditya Wirananda Foto Dok. KPPBC Jagoi Babang

Jagoi Babang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Lokasinya sekitar 250 kilometer di sisi utara kota Pontianak. Dari Pontianak, butuh waktu setidaknya enam jam melalui jalur darat untuk tiba di Jagoi Babang. Sedangkan untuk menuju titik nol perbatasan Indonesia-Malaysia, dari Jagoi Babang hanya perlu menempuh jarak sejauh 2,5 kilometer. Bahkan, dengan pusat kota Sarawak di Malaysia, kecamatan ini hanya berjarak sekitar 50 kilometer atau dapat ditempuh kurang dari dua jam perjalanan.

Menanggapi situasi

Faktor geografis seperti ini, ditambah pembangunan wilayah yang belum setara dengan yang terjadi di Jawa, tak bisa dihindari berdampak pada kebiasaan masyarakat setempat. Sejak dulu, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka lebih menyukai berbelanja ke wilayah Malaysia alih-alih ke kota terdekat di wilayah Indonesia. Kebiasaan ini, seiring perkembangan zaman, memunculkan risiko masuknya barang-barang ilegal ke dalam negeri.

Junanto Kurniawan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai

Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Jagoi Babang mengatakan, “Kalau kita lihat, perbatasan (negara) di Kalimantan Barat ini sepanjang 990 kilometer,” ia melanjutkan, “dan ini berpotensi (menjadi area) pemasukan barang-barang ilegal.” Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merespons situasi ini dengan memperkuat pengawasan di wilayah-wilayah tersebut. Pada 2018, KPPBC TMP C Jagoi Babang resmi dibuka. Sebelum 2018, kantor ini telah ada kendati hanya sebagai kantor tingkat pratama di bawah koordinasi KPPBC Sintete.

Kehadiran KPPBC TMP C Jagoi Babang tidak serta merta disambut baik oleh masyarakat setempat. Bahkan, ketidaknyamanan masyarakat sempat diekspresikan menjadi kekerasan kepada pegawai KPPBC TMP C Jagoi Babang. Pada 2015 saat kantor ini masih setingkat kantor pratama, usai adanya penindakan terhadap barang, KPPBC TMP C Jagoi Babang diserang sejumlah oknum masyarakat. “Mereka menganggap bahwa perdagangan yang mereka lakukan selama ini dari (sejak) nenek moyang mereka adalah sesuatu yang biasa. Begitu ada bea cukai, dianggap sebagai penghambat,” ujar pria

kelahiran Malang ini.

Melalui berbagai upaya, salah satunya dengan komunikasi yang intens dengan para pemimpin adat dan masyarakat, saat ini situasi telah jauh membaik. Bahkan belakangan, KPPBC TMP C Jagoi Babang juga mengadakan pelatihan Bahasa Inggris dan komputer bagi masyarakat setempat. Pelatihan ini selain sebagai upaya menjaga hubungan baik, sekaligus juga untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.

Perdagangan barang bekas

Salah satu hal yang menjadi perhatian Junanto adalah keberadaan Pos Lintas Batas Negara yang belum



memadai karena masih bersifat darurat di Jagoi Babang. Hal ini secara tidak langsung membentuk paradigma di masyarakat bahwa perdagangan lintas negara adalah hal yang biasa saja. Hal berikutnya yang menjadi perhatiannya adalah perlunya edukasi kepada masyarakat terkait perdagangan barang lintas negara. “(Untuk) memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa mereka adalah warga negara Indonesia, jadi mereka punya nasionalisme untuk melindungi Indonesia dari serbuan barang-barang ilegal,” ujarnya.

Sedangkan untuk penindakan, menurut Junanto, yang paling sering ditindak adalah barang bekas. “Paling banyak itu lelong (barang bekas),” ujarnya. Barang bekas ini memiliki potensi merusak industri tekstil dalam negeri. Selain itu, tindak lanjut terhadap barang bekas ini juga terbilang merepotkan. “Begitu menegah lelong ini, kami pun kesulitan melakukan penyimpanannya. Untuk pemusnahan pun tidak mudah,” ujarnya. Umumnya barang-barang bekas ini berupa pakaian, tas, dan aksesoris bermerek.

Selain itu, barang lain yang terbilang sering dilakukan penindakan adalah minuman beralkohol. Junanto mengatakan bahwa mengkonsumsi minuman ini sudah menjadi kebiasaan bagi segelintir masyarakat di Jagoi Babang. “Di sini, minum itu adalah suatu kebudayaan,” ia melanjutkan, “ini PR kita mengedukasi masyarakat bagaimana kalau mau minum pun, minum yang legal.”

Hal-hal yang tidak lazim

Selain lokasi yang perlu banyak usaha untuk mencapainya, dan gejala

sosial yang pernah dihadapi, para pegawai KPPBC TMP C Jagoi Babang juga tidak terlepas dari situasi sosial lain yang tidak lazim dirasakan masyarakat perkotaan. Pertama, permasalahan konektivitas. Junanto mengatakan soal ini merupakan salah satu menu khas di wilayah-wilayah perbatasan. Bahkan masalah konektivitas ini terjadi nyaris di sepanjang wawancara MK+ bersama Kepala KPPBC TMP C Jagoi Babang.

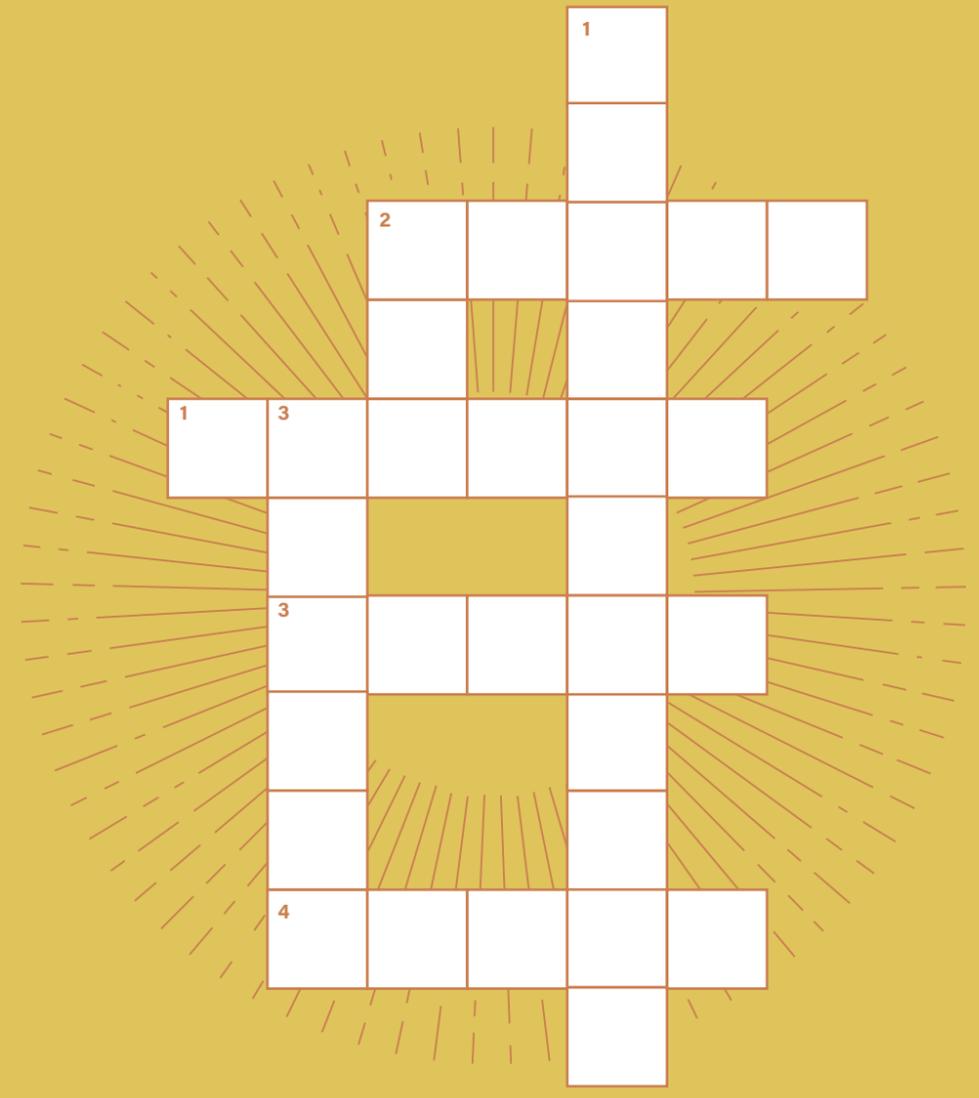
Ihwal lain yang tidak lazim dijumpai di perkotaan adalah keberadaan kantor pemerintah yang sedikit. Instansi pemerintah di Jagoi Babang dapat dihitung jari. Tentu saja karena Jagoi Babang bukan merupakan pusat pemerintahan daerah. Untuk menuju pusat pemerintahan kabupaten Bengkayang saja masih perlu waktu tempuh dua jam perjalanan. “Di sini ada karantina, ada imigrasi juga tapi mereka di sini hanya sebagai pos saja,” ujar Junanto. Kantor dengan 42 personel ini menjadi kantor terbesar di Jagoi Babang.

Perkara ketersediaan tempat tinggal, situasi di Jagoi Babang juga tak bisa disetarakan dengan wilayah perkotaan. Tidak mudah cari kontrakan di Jagoi Babang. Junanto mengatakan, “orang-orang di sini tidak terlalu familiar dengan yang namanya ngontrak.” Lantas, karena seluruh pegawai adalah pendatang, dan mayoritas adalah pegawai baru, salah satu pilihan terbaik adalah tinggal di kantor. “Beramai-ramai,” ia melanjutkan, “kantor kami merangkap sebagai tempat tinggal.” Kendati demikian, Junanto mengatakan para pegawai tetap betah tinggal di kantor. “Alhamdulillah karena kami di sini semuanya sebagai keluarga, jadi semuanya betah,” ujarnya.



Kami Berbenah Buatmu ...

tekateki.



Mendatar:

- 1. Bibit penyakit yang sudah dilemahkan
- 2. Sungai di bagian selatan Papua
- 3. Makanan timur tengah berbahan utama tortila dan daging
- 4. Mandi uap

Menurun:

- 1. Kantor Bea Cukai dalam rubrik Potret Kantor
- 2. Dana alokasi khusus
- 3. Berhubungan dengan masa lalu, tidak lazim dipakai lagi.

Kirim jawaban Anda melalui story post instagram dengan tag IG @majalahmediakeuangan atau melalui email mediakeuangan@kemenkeu.go.id, sertakan nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi

Hari Margasatwa Dunia

3 Maret 2021



Foto: iStock